

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Bahwa harga bahan pokok di Kabupaten Lamongan pada awal tahun 2025 tercatat stabil dan terkendali. Pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui aplikasi **SIPULDABAPOK**, dengan fokus pada tiga pasar utama: Pasar Sidoharjo, Pasar Babat, dan Pasar Blimbing, berikut beberapa komoditas yang mengalami perkembangan harga pada bulan Januari s.d Maret 2025:

- Pada Bulan Januari Komoditas andil terbesar mengalami **kenaikan** harga adalah Cabe Rawit Merah (30,91%), Cabe Merah Besar (5,13%), Cabe Merah Keriting (7,69%), Jagung (10,64%), Bawang Putih (1,97%).
- Bulan Februari beberapa komoditas diatas telah mengalami **penurunan** harga pada minggu ke dua : Cabe Rawit (-2,38%), Cabe Merah Besar (-9,30%), Cabe Merah Keriting (-7,50%).
- Maret minggu ke dua beberapa komoditas yang menjadi andil terbesar pada IPH Kabupaten Lamongan juga semakin mengalami tren positif, komoditas Cabe Rawit Merah, Cabe Merah Besar, Cabe Merah Keriting, Bawang Putih, Tomat rata-rata masing-masing komoditas turun mencapai (-19,76%).

Dengan demikian untuk mitigasi resiko kedepan maka Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus mengadakan kegiatan OP dan GPM secara kontinu guna menjaga stabilisasi harga dan memastikan ketersediaan stok komoditas pangan di pasar tradisional maupun modern.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I 2025, Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan dalam pengendalian inflasi daerah. Meskipun inflasi secara umum masih terkendali, beberapa permasalahan perlu diidentifikasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lamongan :

FluktuasiaHargaaKomoditasaPangan

1. Komoditas seperti cabai mengalami lonjakan harga yang signifikan, dengan harga cabai merah mencapai Rp67.500/kg dan cabai rawit Rp81.375/kg. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan distribusi yang tidak merata. Upaya penanaman cabai di pekarangan terpadu dan peningkatan produksi lokal menjadi solusi jangka panjang yang sedang ditekankan.
2. **Ketergantungan pada Impor dan Distribusi Antar Daerah**
Beberapa komoditas pangan mengalami defisit pasokan akibat gagal panen, seperti bawang dan cabai. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada impor dan distribusi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal.
3. **DinamikaPolitikadanaSosial**
Proses politik, seperti pemilu, dapat mempengaruhi kestabilan harga dan distribusi barang. Ketidakpastian politik dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan distribusi pangan, yang pada gilirannya berdampak pada inflasi .

Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pasar

Beberapa daerah di Lamongan memiliki akses terbatas ke pasar dan infrastruktur distribusi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan barang secara efisien dan meningkatkan biaya distribusi, yang berkontribusi pada inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi daerah, dengan fokus utama pada stabilisasi harga pangan menjelang persiapan Puasa Ramadhan 1445 H.

Pemkab Lamongan mengimplementasikan strategi 4K, yaitu:

1. **Ketersediaan Pasokan:** Menjamin stok pangan yang cukup melalui kerja sama dengan BULOG dan distribusi bantuan beras kepada 97.771 penerima, masing-masing mendapatkan 10 kg beras.
2. **Keterjangkauan Harga:** Melaksanakan Operasi Pasar (OP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menekan harga pangan.
3. **Kelancaran Distribusi:** Mengoptimalkan distribusi pangan ke seluruh kecamatan dan memastikan tidak ada hambatan logistik.
4. **Komunikasi Efektif:** Meningkatkan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan stakeholder terkait untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan I 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan evaluasi dan penguatan kebijakan pengendalian inflasi melalui berbagai strategi yang telah dirancang sebelumnya.

Strategi 4K untuk Pengendalian Inflasi

- Ketersediaan Pasokan: Memastikan pasokan pangan yang cukup melalui kerjasama dengan BULOG dan distribusi yang efisien
- Keterjangkauan Harga: Menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
- Kelancaran Distribusi: Meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk menghindari kelangkaan di pasar.
- Komunikasi yang Efektif: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat serta dengan masyarakat untuk memastikan informasi yang tepat dan cepat.

Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah

Untuk menekan inflasi pada komoditas pangan, Pemkab Lamongan menggencarkan operasi pasar dan gerakan pangan murah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berperan aktif dalam kegiatan ini. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pembelian bahan pokok.

Evaluasi Inflasi dan Dampaknya

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, inflasi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 0,24% (month-to-month) dan 1,76% (year-on-year). Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12%. Meskipun angka inflasi tergolong rendah, Pemkab Lamongan tetap waspada terhadap potensi lonjakan harga, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri dan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya.

1. Pemkab Lamongan terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, BULOG, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Koordinasi yang baik antar stakeholder ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap dinamika pasar dan menjaga kestabilan harga di daerah.
2. Selain langkah-langkah jangka pendek, Pemkab Lamongan juga fokus pada strategi jangka panjang, seperti program penanaman sayuran di pekarangan rumah dan upaya memastikan keberhasilan panen raya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan pada triwulan I 2025 menunjukkan bahwa meskipun inflasi relatif terkendali, Pemkab Lamongan tetap proaktif dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga. Melalui implementasi strategi 4K, operasi pasar, dan kolaborasi erat dengan berbagai pihak, diharapkan inflasi dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan, berikut beberapa rekomendasi untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan pada Triwulan I 2025:

- **Peningkatan Intensitas Operasi Pasar:** Memperluas cakupan dan frekuensi operasi pasar murah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan potensi inflasi tinggi.
- **Optimalisasi Teknologi Informasi:** Mengintegrasikan platform digital untuk pemantauan harga secara real-time dan memperkuat kerjasama antar daerah untuk distribusi pangan yang lebih efisien.
- **Diversifikasi Sumber Pangan Lokal:** Mendorong masyarakat untuk menanam berbagai jenis pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.
- **Evaluasi dan Monitoring Berkala:** Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika pasar dan kondisi ekonomi terkini.

Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan koordinasi yang baik antara semua pihak, diharapkan inflasi di Kabupaten Lamongan dapat terkendali dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.